

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Orientasi utama perusahaan sebagai suatu entitas bisnis pada dasarnya diarahkan pada pencapaian keuntungan yang optimal sekaligus peningkatan kemakmuran pemegang saham melalui pembentukan nilai tambah yang berkesinambungan (Junaidi, 2022; Utari & Khomsiyah, 2024). Namun demikian, dalam cakupan yang lebih komprehensif, perusahaan tidak hanya berkewajiban memenuhi kepentingan pemilik modal, melainkan juga diharapkan mampu menciptakan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan terhadap aktivitas perusahaan (Dila & Aryati, 2023; Dumanauw & I Gusti Ngurah Agung Suaryana, 2021; I Gusti Ngurah Teja Wijaya & Erawati, 2024). Dari sudut pandang keuangan, orientasi tersebut tercermin melalui berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan, karena aspek ini dipandang sebagai tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan manajemen ketika mengelola sumber daya secara efektif, efisien, serta berorientasi pada keberlangsungan jangka panjang (Erlangga et al., 2021).

Nilai perusahaan sendiri menggambarkan bagaimana pasar menilai kemampuan perusahaan dalam menciptakan arus kas yang berkelanjutan pada masa mendatang, di samping kemampuannya menjaga kestabilan kinerja di tengah kondisi lingkungan bisnis yang terus mengalami perubahan. Oleh sebab itu, peningkatan nilai perusahaan tidak semata-mata diarahkan pada perolehan laba dalam jangka pendek, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan reputasi

perusahaan, kredibilitas tata kelola, serta komitmen terhadap keberlanjutan usaha pada masa yang akan datang (Prayogo et al., 2023). Dalam perspektif tersebut, nilai perusahaan tidak hanya dipahami sebagai indikator yang bersifat finansial semata, tetapi juga mencerminkan tingkat kepercayaan pasar terhadap keberlangsungan strategi bisnis yang dijalankan perusahaan.

Dengan adanya kepentingan tersebut, pembahasan mengenai optimalisasi nilai perusahaan menjadi isu yang penting untuk dianalisis, terutama pada sektor industri yang memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional, salah satunya adalah industri sektor makanan dan minuman. Sepanjang periode 2022 hingga 2024, produk domestik bruto atas dasar harga berlaku berdasarkan lapangan usaha pada industri makanan dan minuman menunjukkan perkembangan yang dinamis dengan kecenderungan pertumbuhan positif yang cukup signifikan. Berikut merupakan data dari jumlah PDB yang dihasilkan berdasarkan lapangan usaha:



Gambar 1. 1 PDB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022-2024

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Data Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha selama kurun waktu 2022–2024 pada gambar 1.1 di atas memperlihatkan bahwa industri makanan dan minuman mengalami pertumbuhan yang cenderung stabil dengan tingkat perkembangan yang relatif lebih tinggi dibandingkan sejumlah sektor industri lainnya. Keberlanjutan pertumbuhan pada sektor manufaktur, terutama industri makanan dan minuman, memperkuat posisi sektor ini sebagai salah satu komponen penting dalam perekonomian nasional (Oktaviyanti & Nurleli, 2024). Peningkatan kontribusi industri makanan dan minuman yang terjadi secara bertahap dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa tingkat permintaan konsumen masih terpelihara dengan baik serta mencerminkan kemampuan sektor ini dalam bertahan menghadapi dinamika kondisi ekonomi (Oktaviyanti & Nurleli, 2024).

Keadaan tersebut menandakan bahwa produk makanan dan minuman tetap menjadi bagian utama dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia. Posisi strategis industri makanan dan minuman mendorong perusahaan-perusahaan di dalamnya untuk tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian laba, tetapi juga menerapkan *Good corporate governance* sebagai bagian penting dalam pengelolaan perusahaan. GCG dipandang sebagai suatu sistem yang meliputi struktur, prosedur, serta mekanisme perusahaan yang dirancang berdasarkan prinsip akuntabilitas guna mendukung peningkatan nilai perusahaan secara berkelanjutan dalam jangka panjang (Pratama & Ainiyah, 2023). Sejumlah bukti empiris memperlihatkan bahwa penerapan GCG memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, sehingga perusahaan yang menerapkan tata kelola

tersebut cenderung memiliki kemampuan lebih baik dalam meningkatkan performa keuangannya (Wahyuningrum, 2023). Terdapat beberapa penelitian yang turut memperkuat temuan tersebut yaitu menurut Pratama & Ainiyah (2023) menyatakan bahwa semakin baik kualitas GCG yang diterapkan, maka nilai perusahaan juga akan mengalami peningkatan. Di samping itu menurut Wahyuningrum (2023) pelaksanaan strategi perusahaan yang mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan hanya dapat berlangsung secara optimal apabila didukung oleh sistem tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam praktik penerapannya, *Good corporate governance* membutuhkan mekanisme yang mampu memastikan efektivitas fungsi pengawasan serta transparansi dalam pengelolaan perusahaan. Salah satu instrumen penting dalam mekanisme GCG ialah kepemilikan institusional (*institutional ownership*), yaitu persentase kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan investasi, maupun lembaga keuangan lainnya (E. S. Sari & Fitriyah, 2024). Tingginya tingkat kepemilikan institusional dipandang dapat memperkuat pengawasan terhadap aktivitas manajemen secara lebih efektif, sehingga mendorong pihak manajemen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham sekaligus meminimalkan kemungkinan terjadinya konflik keagenan (Prayanthi & Laurens, 2020).

Kondisi tersebut selaras dengan teori keagenan yang menjelaskan bahwa keberadaan investor institusional berperan sebagai mekanisme pengendalian eksternal yang efektif dalam membatasi perilaku *oportunistik* manajemen. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh

positif terhadap kinerja keuangan maupun nilai perusahaan (Hidayat et al., 2021a). Namun demikian, beberapa hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak selalu signifikan karena dipengaruhi oleh konteks industri serta karakteristik perusahaan yang menjadi objek penelitian (E. S. Sari & Fitriyah, 2024).

Selain kepemilikan institusional, mekanisme *Good corporate governance* yang juga memiliki peran penting ialah keberadaan dewan komisaris independen (*independent commissioner*). Komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan serta tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pihak manajemen, anggota dewan komisaris lainnya, maupun pemegang saham pengendali, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasannya dapat dilakukan secara objektif dan netral (S. Sanusi et al., 2023). Ketentuan mengenai keberadaan komisaris independen telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 57/POJK.04/2017 yang menetapkan bahwa jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya sebesar 30% dari keseluruhan anggota dewan komisaris perusahaan (Saragih & Forever, 2024a).

Kehadiran komisaris independen diharapkan mampu memperkuat kualitas pengawasan terhadap kebijakan manajemen, mengurangi kemungkinan terjadinya praktik kecurangan, serta memastikan bahwa keputusan strategis perusahaan mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan secara proporsional. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda terkait pengaruh komisaris independen terhadap kinerja maupun nilai perusahaan. Sejumlah studi menemukan bahwa peningkatan proporsi komisaris independen

memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, terutama pada *Return on Equity* (Pasupati, 2021). Akan tetapi, penelitian lain memperlihatkan bahwa komisaris independen tidak selalu memberikan pengaruh signifikan terhadap profitabilitas maupun nilai perusahaan, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas peran komisaris independen sangat dipengaruhi oleh kualitas individu yang menjalankan fungsi tersebut serta dinamika internal perusahaan (E. S. Sari & Fitriyah, 2024; Shenurti et al., 2022).

Selain komposisi keanggotaan, tingkat efektivitas dewan komisaris juga dipengaruhi oleh seberapa intens aktivitas pengawasan yang dijalankan, yang salah satunya dapat dilihat melalui frekuensi rapat dewan komisaris (*board meeting frequency*). Frekuensi penyelenggaraan rapat dewan komisaris mencerminkan kualitas komitmen serta keseriusan dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perusahaan (Arofah & Khomsiyah, 2023a). Pelaksanaan rapat secara rutin dan berkala memberikan kesempatan bagi dewan komisaris untuk melakukan pemantauan terhadap kinerja manajemen secara lebih mendalam, mengevaluasi pelaksanaan strategi perusahaan, serta merespons berbagai permasalahan dengan lebih cepat dan tepat (Wahyuningsih & Mochlasin, 2021). Semakin sering rapat dewan komisaris dilakukan, semakin besar pula peluang bagi dewan untuk mengidentifikasi risiko perusahaan, memberikan arahan strategis, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris tidak selalu memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kualitas substansi

pembahasan dalam rapat memiliki peran yang lebih penting dibandingkan sekadar jumlah pertemuan yang dilaksanakan. Oleh sebab itu, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan frekuensi rapat dewan komisaris sebagai bagian dari mekanisme GCG secara bersama-sama membentuk sistem tata kelola yang saling melengkapi dalam mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta nilai perusahaan pada sektor makanan dan minuman (Wahyuningsih & Mochlasin, 2021).

Keterkaitan antara tata kelola perusahaan dan nilai perusahaan menjadi semakin relevan ketika dihubungkan dengan kinerja keuangan pada sektor makanan dan minuman. Dari perspektif kinerja keuangan, sektor ini tidak hanya memiliki fungsi dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional, tetapi juga berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, sehingga berperan dalam menurunkan tingkat pengangguran serta memperkuat ketahanan pangan nasional (J. F. A. Zahra & Rakhmawati, 2021). Kinerja keuangan perusahaan turut dijadikan sebagai bentuk akuntabilitas manajemen kepada investor karena penilaiannya mencakup kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, menciptakan nilai pasar, serta menjaga prospek pertumbuhan di masa mendatang (Budi & Zuhrohtun, 2023).

Selain memperhatikan kinerja keuangan, terdapat upaya lain yang dilakukan untuk memperoleh dukungan yang lebih luas dari para *stakeholder* yaitu perusahaan perlu memperlihatkan bahwa peningkatan kinerja keuangan berjalan seiring dengan pengelolaan lingkungan yang baik, sehingga pada akhirnya dapat mendorong peningkatan nilai perusahaan. Sejalan dengan kondisi tersebut, perusahaan manufaktur, termasuk industri makanan dan minuman, memiliki

karakteristik operasional yang menyebabkan aspek tanggung jawab terhadap lingkungan menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Kegiatan produksi yang dijalankan perusahaan berpotensi menghasilkan berbagai bentuk pencemaran yang dapat memberikan dampak terhadap ekosistem di sekitarnya (Kelly & Henny, 2023). Oleh sebab itu, pengungkapan lingkungan tidak hanya dipandang sebagai bentuk kepatuhan administratif perusahaan, tetapi juga menjadi indikator penting dalam menilai keberlanjutan operasional perusahaan sekaligus instrumen komunikasi kepada pemangku kepentingan.

Pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*) merupakan praktik penyampaian informasi terkait kinerja lingkungan perusahaan kepada publik melalui laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan, yang mencakup informasi mengenai pemanfaatan material, konsumsi energi, pengelolaan air, biodiversitas, emisi, limbah, kepatuhan lingkungan, serta penilaian terhadap rantai pasok yang berorientasi pada keberlanjutan (Maggi et al., 2023). Praktik tersebut dewasa ini dipandang sebagai elemen strategis yang mampu menurunkan biaya, membangun citra perusahaan yang baik, menarik konsumen yang peduli terhadap perlindungan lingkungan, serta memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, sehingga pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan kinerja jangka panjang perusahaan (Aluchna et al., 2023; Maggi et al., 2023).

Perusahaan yang mampu menyajikan informasi lingkungan secara komprehensif umumnya memperoleh persepsi positif dari masyarakat maupun investor (Kelly & Henny, 2023; Pereira et al., 2023). Dengan demikian, orientasi perusahaan tidak dapat hanya terfokus pada aspek finansial semata, melainkan juga

perlu memperhatikan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Ekspektasi masyarakat terhadap aktivitas bisnis saat ini semakin meningkat, yaitu terciptanya kegiatan usaha yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun ancaman terhadap kehidupan manusia (Rahelliamelinda & Handoko, 2024). Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk mengubah pandangan negatif yang selama ini mengaitkan sektor industri dengan pencemaran lingkungan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi pengelolaan lingkungan yang lebih baik, perusahaan dapat menerapkan kerangka pelaporan keberlanjutan yang sistematis melalui *Global Reporting Initiative (GRI) Standards*, khususnya seri GRI 300 yang secara spesifik mengatur pengungkapan kinerja lingkungan. GRI 300 merupakan rangkaian standar pelaporan keberlanjutan yang mencakup delapan topik utama, yaitu material (GRI 301), energi (GRI 302), air dan limbah cair (GRI 303), keanekaragaman hayati (GRI 304), emisi (GRI 305), limbah (GRI 306), kepatuhan lingkungan (GRI 307), serta penilaian lingkungan pemasok (GRI 308) (Maggi et al., 2023; Papa et al., 2022). Penggunaan GRI 300 sebagai pedoman pengungkapan lingkungan didasarkan pada sejumlah alasan teoretis dan empiris.

Secara teoretis, GRI 300 selaras dengan teori keagenan yang menjelaskan bahwa pengungkapan lingkungan berfungsi sebagai mekanisme untuk menekan asimetri informasi serta biaya pengawasan antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal, sehingga apabila perusahaan tidak melakukan pengungkapan secara memadai, potensi konflik keagenan dan biaya pengawasan yang ditanggung pemilik modal akan semakin meningkat (Razali et al., 2023).

Selain itu, kerangka GRI 300 sejalan dengan teori sinyal yang menegaskan bahwa pengungkapan kinerja lingkungan yang berkualitas berfungsi sebagai sinyal positif kepada pasar mengenai komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan, sehingga mampu mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan investor (Kartana et al., 2023). Pengungkapan yang merujuk pada GRI 300 juga dipandang sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, dan juga seluruh pemangku kepentingan yang dapat memengaruhi maupun dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan (Aluchna et al., 2023; Angela & Sari, 2023a).

Pengungkapan lingkungan berbasis *Global Reporting Initiative* (GRI), khususnya seri GRI 300 yang secara spesifik mengatur topik lingkungan, kini menjadi kerangka acuan yang paling banyak diadopsi oleh perusahaan di Indonesia dalam menyusun laporan keberlanjutan, mengingat GRI merupakan standar pelaporan global pertama yang diterima secara luas dan secara khusus dirancang untuk mengukur dampak organisasi terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial (Mufida et al., 2024; Ramadhani, 2022). Studi pada sektor migas Indonesia menunjukkan bahwa kepatuhan pengungkapan lingkungan diukur langsung berdasarkan delapan topik dalam GRI 300 *Environmental Standards*, sekaligus menegaskan bahwa praktik pengungkapan lingkungan di Indonesia telah bergeser dari sifat sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*) sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 (Qothrunada & Handayani, 2023). Pergeseran ini sejalan dengan kewajiban pengelolaan lingkungan yang sangat ketat bagi entitas usaha dan pabrik di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup Pasal 22 ayat (1), yang menegaskan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL, serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang menjadikan AMDAL sebagai syarat mutlak legalitas operasional industri (Tambunan, 2022). Dengan demikian, adopsi GRI, idealnya GRI 300, oleh perusahaan bukan hanya merupakan praktik pelaporan yang baik, melainkan juga selaras dengan tuntutan kepatuhan hukum yang sangat mengikat bagi perusahaan, khususnya yang bersifat padat-pabrik dan berdampak langsung pada lingkungan.

Dasar hukum penerapan pengungkapan lingkungan di Indonesia mengacu pada beberapa regulasi penting yang mewajibkan perusahaan untuk melaporkan kinerja lingkungannya. Pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 74 mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Puyo et al., 2024). Kedua, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik mewajibkan emiten dan perusahaan publik untuk menyusun laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang memuat informasi mengenai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terpisah dari laporan tahunan maupun terintegrasi di dalamnya (Cahyaningrum & Violita, 2023; A. R. Purnomo, 2022; Sudjono & Setiawan, 2022). POJK 51/2017 yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2020 mendorong perusahaan untuk meningkatkan kesadaran serta komitmen terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*

Goals), sekaligus menjadi instrumen untuk membangun legitimasi organisasi di mata masyarakat (Deharlie & Aminah, 2024; Rini, 2024a). Ketiga, Surat Edaran OJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 memberikan pedoman teknis mengenai bentuk dan isi laporan keberlanjutan yang mengarahkan emiten untuk menggunakan kerangka pelaporan internasional yang diakui, salah satunya adalah standar GRI. Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 mempertegas kewajiban pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan (Qothrunada & Handayani, 2023). Kelima, kewajiban substantif di lapangan turut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang secara tegas mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan, khususnya yang berbasis pabrik atau pengolahan sumber daya, untuk memiliki AMDAL sebagai prasyarat legalitas operasional (Tambunan, 2022). Rangkaian regulasi tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan lingkungan di Indonesia telah bergeser dari praktik sukarela (*voluntary disclosure*) menjadi praktik yang bersifat wajib (*mandatory disclosure*), sehingga perusahaan dituntut untuk menyajikan informasi lingkungan secara transparan, terverifikasi, dan dapat diperbandingkan.

Penerapan pengungkapan lingkungan dengan kerangka GRI 300 dalam kehidupan sehari-hari memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai aspek aktivitas perusahaan maupun kehidupan masyarakat luas. Pada tataran operasional perusahaan makanan dan minuman, pengungkapan terhadap GRI 301 mengenai material berkaitan dengan transparansi penggunaan bahan baku, termasuk

persentase bahan baku terbarukan, bahan kemasan yang dapat didaur ulang, serta jejak rantai pasok yang berkelanjutan. Pengungkapan GRI 302 tentang energi tercermin dalam pelaporan konsumsi listrik pabrik, penggunaan bahan bakar untuk transportasi distribusi, serta investasi pada energi terbarukan, yang secara langsung berkaitan dengan upaya efisiensi biaya operasional. GRI 303 mengenai air dan limbah cair sangat relevan pada industri minuman karena menyangkut volume pengambilan air, kualitas air buangan, serta inisiatif daur ulang air pada fasilitas produksi. GRI 305 tentang emisi memberikan informasi mengenai jejak karbon perusahaan yang dihasilkan dari aktivitas produksi maupun rantai distribusi, sehingga dapat dimanfaatkan baik oleh konsumen yang peduli terhadap perubahan iklim maupun oleh regulator dalam menyusun kebijakan pajak karbon (Sudjono & Setiawan, 2022). GRI 306 mengenai limbah memberikan transparansi atas pengelolaan sisa produk pangan, limbah kemasan, serta dampaknya terhadap masyarakat sekitar pabrik. Pada tataran kehidupan sehari-hari masyarakat, pengungkapan lingkungan menjadi instrumen penting bagi konsumen dalam memilih produk yang ramah lingkungan, bagi investor ritel dalam memilih saham yang sejalan dengan nilai keberlanjutan, serta bagi komunitas yang tinggal di sekitar fasilitas produksi dalam mengawasi dampak lingkungan operasi perusahaan terhadap kualitas hidup mereka (Pereira et al., 2023; Qothrunada & Handayani, 2023)

Dengan demikian, pengungkapan lingkungan berbasis GRI 300 berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang menghubungkan kepentingan perusahaan, regulator, investor, konsumen, serta masyarakat dalam mewujudkan praktik bisnis

yang berkelanjutan. Implementasi pengungkapan lingkungan berbasis GRI 300 memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan, antara lain meningkatkan efisiensi biaya dan pemanfaatan sumber daya, memperluas akses pasar, mengurangi potensi konflik dengan para pemangku kepentingan, serta mendorong peningkatan laba yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan (Kurniawansyah & Prastiwi, 2022; Maggi et al., 2023). Di samping itu, pengungkapan lingkungan yang komprehensif juga dapat meningkatkan kesadaran serta motivasi karyawan mengenai pentingnya perlindungan lingkungan, sekaligus menekan dampak negatif dari aktivitas operasional dan meningkatkan produktivitas perusahaan (Tarigan et al., 2021).

Komitmen perusahaan dalam mengadopsi standar GRI 300 mencerminkan adanya upaya konkret untuk meminimalkan dampak lingkungan yang ditimbulkan, sehingga memberikan sinyal positif bagi investor (Aluchna et al., 2023; Pramarta et al., 2025). Perusahaan yang menyajikan pengungkapan lingkungan secara komprehensif umumnya dipandang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan serta mampu membangun sistem operasional yang lebih efisien dan berkelanjutan dalam jangka panjang (Rahelliamelinda & Handoko, 2024). Melalui pengungkapan lingkungan yang berkualitas, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat daya saing, dan membangun citra perusahaan yang positif, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kepercayaan investor serta nilai perusahaan (Samhadi et al., 2024). Oleh sebab itu, keberadaan kerangka pelaporan GRI 300 menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas tanggung jawab lingkungan pada perusahaan manufaktur, termasuk industri makanan dan

minuman, seiring meningkatnya tuntutan *stakeholder* terhadap tanggung jawab lingkungan perusahaan (Damas et al., 2021).

Meskipun demikian, berbagai penelitian mengenai dampak penerapan pengungkapan lingkungan masih menunjukkan hasil yang beragam. Sejumlah studi mengemukakan bahwa pengungkapan lingkungan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap nilai maupun terhadap kinerja keuangan perusahaan (Angela & Sari, 2023a; Kartana et al., 2023). Di sisi lain, terdapat pandangan yang menyebutkan bahwa investor cenderung lebih memusatkan perhatian pada aspek kinerja keuangan dibandingkan faktor lingkungan, sehingga pengaruh pengungkapan lingkungan dianggap relatif lebih rendah, terutama pada konteks negara berkembang di mana investor masih belum sepenuhnya menjadikan informasi lingkungan sebagai pertimbangan utama dalam keputusan investasi (Angela & Sari, 2023; Sari & Sutopo, 2023). Beberapa penelitian juga menemukan bahwa perusahaan yang melakukan pengungkapan lingkungan tidak selalu mengalami peningkatan kinerja lingkungan secara signifikan, terutama ketika praktik pengungkapan masih bersifat naratif dan belum memuat data kuantitatif yang dapat diverifikasi (Papa et al., 2022; Tarigan et al., 2021).

Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas penerapan pengungkapan lingkungan berbasis GRI 300 sangat dipengaruhi oleh karakteristik industri, kualitas tata kelola perusahaan, serta strategi perusahaan dalam mengintegrasikan pelaporan lingkungan ke dalam keseluruhan sistem tata kelola perusahaan (Bahaswar et al., 2025; Pramarta et al., 2025). Oleh karena itu, kajian mengenai hubungan antara GCG, kinerja keuangan, dan nilai perusahaan dengan

pengungkapan lingkungan sebagai variabel moderasi masih relevan untuk diteliti lebih lanjut.

Pada akhirnya, seluruh mekanisme tata kelola, kinerja keuangan, maupun komitmen pengungkapan lingkungan yang telah diuraikan tersebut bermuara pada satu indikator utama yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu sejauh mana pasar memberikan penilaian terhadap perusahaan melalui Nilai Perusahaan. Sebagai variabel dependen dalam penelitian ini, Nilai Perusahaan diukur menggunakan Tobin's Q, yang dipilih karena kemampuannya menangkap secara komprehensif respons pasar terhadap keseluruhan informasi yang telah dipaparkan sebelumnya, baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan. Dalam menilai nilai perusahaan, Tobin's Q digunakan sebagai indikator yang menggambarkan persepsi pasar terhadap nilai total perusahaan dibandingkan dengan biaya penggantian asetnya pada sektor tersebut.

Tobin's Q dikembangkan pertama kali oleh James Tobin, seorang peraih Nobel Ekonomi asal Amerika Serikat, pada tahun 1967. Konsep Tobin's Q mengacu pada perbandingan antara nilai pasar dari ekuitas perusahaan ditambah dengan nilai utang terhadap total aset perusahaan, sehingga rasio ini dianggap mampu menangkap baik nilai aset perusahaan saat ini maupun potensi pertumbuhan di masa mendatang (Kartana et al., 2023; Priyanto & Suhandi, 2023). Menurut Sutejo et al., (2024), Tobin's Q merupakan salah satu ukuran penting yang mencerminkan bagaimana investor memberikan penilaian terhadap prospek pertumbuhan serta kualitas manajemen perusahaan. Tobin's Q dipandang lebih komprehensif dibandingkan rasio pasar lainnya karena rasio ini menggabungkan informasi pasar

saham dengan data akuntansi sehingga menghasilkan ukuran nilai perusahaan yang lebih akurat (Sari & Sutopo, 2023; Suprpto & Lindawati, 2023). Apabila nilai Tobin's Q lebih dari satu, hal tersebut menunjukkan bahwa pasar menilai perusahaan lebih tinggi dari nilai buku asetnya, yang mencerminkan adanya ekspektasi pertumbuhan dan peluang investasi yang positif. Sebaliknya, apabila Tobin's Q berada di bawah satu, hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai saham perusahaan undervalued atau pasar memandang perusahaan belum mampu memanfaatkan asetnya secara optimal (Sari & Sutopo, 2023).

Pada sektor makanan dan minuman yang memiliki karakteristik relatif stabil dan berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, perubahan nilai Tobin's Q dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal perusahaan, seperti tingkat efisiensi operasional dan kualitas pengelolaan keuangan (Husieva et al., 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Yulandreano et al., (2021) juga mengungkapkan bahwa kinerja keuangan perusahaan yang diukur melalui berbagai rasio memiliki pengaruh yang besar terhadap nilai pasar perusahaan. Di tengah kondisi pertumbuhan sektor yang cenderung stabil, analisis yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Tobin's Q menjadi penting dilakukan agar perusahaan dalam sektor ini dapat memahami dinamika nilai perusahaan secara lebih komprehensif (Achyani & Amperawati, 2024; Istutik et al., 2024).

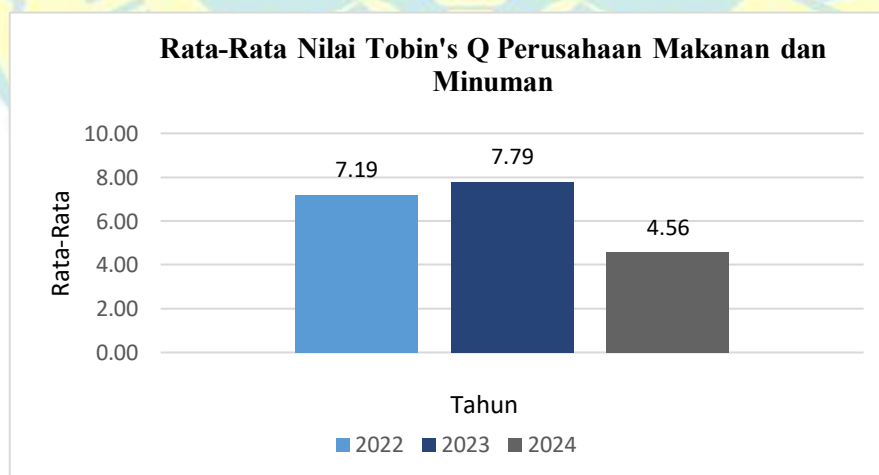
Salah satu faktor yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan nilai perusahaan adalah *Good corporate governance*. Penerapan tata kelola perusahaan yang berkualitas dapat memperkuat tingkat kepercayaan investor sekaligus meningkatkan nilai Tobin's Q. Penelitian yang dilakukan oleh Zazdravnykh &

Mytseva (2025) menunjukkan bahwa perusahaan dengan mekanisme GCG yang baik cenderung mengalami peningkatan nilai pasar. Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian dari Kencanawati et al. (2024) menegaskan bahwa rasio keuangan seperti *Debt to Equity Ratio* dan *Current Ratio* memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja keuangan yang pada akhirnya turut memengaruhi nilai perusahaan. Penelitian Muzakir (2025) juga membuktikan bahwa keberadaan dewan komisaris independen memberikan dampak positif terhadap Tobin's Q pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, di mana ukuran perusahaan turut memperkuat hubungan tersebut. Hasil-hasil tersebut menegaskan bahwa tata kelola perusahaan yang baik berperan strategis dalam membangun ekspektasi positif investor terhadap prospek pertumbuhan perusahaan.

Di samping penerapan GCG, aspek kinerja keuangan juga menjadi faktor penting dalam menjaga nilai perusahaan, khususnya pada sub sektor makanan dan minuman. Data menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas perusahaan yang diperoleh melalui pengelolaan sumber daya secara efisien serta kemampuan memahami kondisi pasar mampu meningkatkan kepercayaan investor. Selain itu, perusahaan pada sub sektor ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti fluktuasi biaya produksi dan tingginya tingkat persaingan, sehingga diperlukan kemampuan adaptasi yang cepat guna mempertahankan kinerja keuangan yang baik (Andryushin & Grigoryev, 2022).

Selain *good corporate governance* dan kinerja keuangan, peran pengungkapan lingkungan pada sektor makanan dan minuman juga semakin memperoleh perhatian. Desmiza (2023) mengemukakan bahwa perusahaan yang

memiliki komitmen terhadap pelaporan dan transparansi kinerja lingkungan umumnya memperoleh legitimasi sosial yang lebih baik, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai perusahaan di pasar. Pendekatan yang berorientasi pada keberlanjutan, termasuk pengelolaan limbah, pengurangan emisi, serta optimalisasi penggunaan sumber daya yang diungkapkan secara transparan melalui kerangka GRI 300, tidak hanya dipandang sebagai tanggung jawab etis perusahaan, tetapi juga menjadi strategi bisnis yang efektif untuk menarik minat investor pada era modern saat ini (Alipbeki et al., 2023; Wicaksono & Rizkianto, 2025a). Melalui integrasi pengungkapan lingkungan ke dalam mekanisme penilaian Tobin's Q dan tata kelola perusahaan, perusahaan pada sektor makanan dan minuman memiliki peluang untuk tidak hanya mempertahankan keberlangsungan usahanya, tetapi juga meningkatkan daya saing di tengah persaingan pasar yang semakin ketat (Achyani & Amperawati, 2024; Agustia et al., 2022).



Gambar 1. 2 Rata-Rata Nilai Tobins'Q

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan grafik rata-rata Tobin's Q perusahaan makanan dan minuman selama periode 2022–2024, terlihat adanya pergerakan nilai perusahaan yang bersifat fluktuatif. Nilai Tobin's Q meningkat dari 7,19 pada tahun 2022 menjadi 7,79 pada tahun 2023, namun kemudian mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga mencapai 4,56 pada tahun 2024. Penurunan yang tajam pada tahun 2024 tersebut menunjukkan adanya pelemahan persepsi pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah berdasarkan total aset yang dimiliki.

Tobin's Q digunakan sebagai indikator nilai perusahaan yang menggambarkan sejauh mana pasar memberikan penghargaan terhadap nilai keseluruhan perusahaan dibandingkan dengan biaya penggantian asetnya, sehingga rasio ini mampu menangkap ekspektasi investor terhadap kinerja masa depan perusahaan secara lebih komprehensif (Kartana et al., 2023; Priyanto & Suhandi, 2023). Dengan demikian, perubahan rasio Tobin's Q mencerminkan dinamika tingkat kepercayaan investor terhadap prospek perusahaan di masa mendatang (Zulianda & Riski, 2024). Ketika nilai Tobin's Q mengalami penurunan secara berkelanjutan, kondisi tersebut dapat mengindikasikan bahwa pasar menilai ekspektasi pertumbuhan laba, kestabilan arus kas, serta efektivitas strategi manajerial perusahaan belum berjalan secara optimal (S. I. Yusuf et al., 2024). Walaupun sektor makanan dan minuman secara makroekonomi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto nasional, nilai perusahaan pada tingkat emiten tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor internal

maupun eksternal yang kompleks, seperti dinamika pasar modal dan perubahan sentimen investor terhadap risiko industri (Mahdi & Hotang, 2023).

Penelitian Desmiza (2023) juga menegaskan bahwa nilai perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja keuangan, tetapi turut dipengaruhi oleh aspek keberlanjutan, termasuk pengungkapan kinerja lingkungan yang semakin menjadi perhatian investor modern Sari & Sutopo, 2023; Wicaksono & Rizkianto, 2025). Oleh sebab itu, tren penurunan Tobin's Q yang cukup drastis pada tahun 2024 yang diamati selama periode 2022–2024 menunjukkan perlunya penguatan strategi korporasi yang lebih adaptif terhadap tekanan ekonomi dan perubahan preferensi pasar. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa stabilitas nilai perusahaan memerlukan sinergi antara kinerja keuangan, tata kelola perusahaan, dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam kondisi tersebut, *Good corporate governance* (GCG) memiliki peran penting sebagai fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan serta akuntabilitas perusahaan. GCG tidak hanya berfungsi sebagai sistem pengendalian internal, tetapi juga menjadi mekanisme strategis yang dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan nilai perusahaan (Malik & Kadarningsih, 2023). Teori agensi menjelaskan bahwa pemisahan antara kepemilikan saham dan pengelolaan perusahaan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara pihak manajemen dan pemegang saham. Oleh karena itu, GCG berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian agar setiap keputusan manajerial tetap berjalan selaras dengan kepentingan pemegang saham (Noer, 2024). Penerapan prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab,

independensi, dan keadilan, menjadi landasan utama dalam membangun sistem tata kelola perusahaan yang efektif (Surya, 2023).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa variabel seperti kepemilikan institusional dan peran dewan komisaris independen mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan nilai perusahaan. Namun demikian, beberapa hasil penelitian lain memperlihatkan bahwa pengaruh tersebut tidak selalu signifikan (Wulantari et al., 2022). Dalam implementasi GCG, keberadaan dewan komisaris, baik yang berasal dari internal maupun independen, memegang peranan penting dalam memastikan efektivitas tata kelola perusahaan. Komisaris independen memiliki fungsi untuk menjaga objektivitas dalam proses pengambilan keputusan serta memastikan bahwa kebijakan perusahaan tetap mengakomodasi kepentingan pemegang saham (Yuliana & Maharani, 2022). Praktik ini juga diperkuat di berbagai negara maju, seperti Amerika Serikat, melalui penerapan regulasi *Sarbanes-Oxley Act* yang bertujuan memperkuat tata kelola perusahaan (Purnomo et al., 2024). Sementara itu, penerapan GCG di Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi mampu berfungsi sebagai instrumen nyata dalam membangun nilai tambah, meningkatkan kredibilitas perusahaan, serta menjaga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Selain penerapan prinsip *Good corporate governance* sebagai aspek manajerial, perusahaan juga perlu memberikan perhatian terhadap kinerja keuangan karena faktor ini memiliki pengaruh penting terhadap perubahan nilai perusahaan. Kinerja keuangan merupakan suatu proses evaluasi yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif

sesuai dengan prinsip akuntansi serta ketentuan regulasi yang berlaku (Mustofa & Murtanto, 2024). Dalam hal ini, laporan keuangan berperan sebagai media komunikasi utama antara manajemen dan pemegang saham yang menggambarkan tingkat keberhasilan perusahaan dalam mencapai target keuangan pada periode tertentu. Semakin baik kondisi kinerja keuangan perusahaan, semakin besar pula potensi imbal hasil yang diharapkan oleh investor (Mahdi & Hotang, 2023). Dengan demikian, upaya peningkatan kinerja keuangan menjadi aspek yang krusial karena tidak hanya berfungsi untuk menjaga kepercayaan pasar, tetapi juga meningkatkan daya tarik saham perusahaan di pasar modal (Amelia & Meidiyustiani, 2024).

Dalam aspek profitabilitas, kemampuan perusahaan menghasilkan laba menjadi indikator utama untuk menilai efektivitas pengelolaan sumber daya serta strategi keuangan yang diterapkan. Pengukuran profitabilitas dapat dilakukan melalui berbagai rasio, seperti *Gross Profit Margin*, *Operating Profit Margin*, *Net Profit Margin*, *Return on Assets (ROA)*, dan *Return on Equity (ROE)* (Oktaviani et al., 2024). Di antara berbagai indikator tersebut, ROE sering digunakan untuk mengevaluasi kemampuan manajemen dari sudut pandang pemegang saham karena rasio ini menunjukkan sejauh mana modal ekuitas mampu menghasilkan laba bersih. Akan tetapi, hasil penelitian terdahulu masih memperlihatkan temuan yang beragam.

Beberapa studi menyatakan bahwa ROE berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan karena peningkatan laba dapat mendorong kenaikan harga saham (Yana & Agustiningsih, 2022). Di sisi lain, terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa ROE tidak selalu memberikan pengaruh signifikan meskipun kondisi kinerja

keuangan perusahaan tergolong baik (Ekaristi & Apip, 2023). Perbedaan hasil tersebut mengindikasikan bahwa kontribusi kinerja keuangan terhadap peningkatan nilai perusahaan juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti efektivitas penerapan tata kelola perusahaan, kondisi ekonomi makro, serta tingkat kepercayaan investor.

Dalam penelitian ini, *Return on Equity* (ROE) digunakan sebagai indikator utama profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan modal yang dimiliki guna menghasilkan laba bersih setelah pajak. Tingginya nilai ROE menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola modal secara efisien serta memiliki kemampuan dalam menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham (Purwani & Fitriyani, 2023). Selain itu, peningkatan ROE kerap dipandang sebagai sinyal positif oleh investor karena mencerminkan efektivitas manajemen dalam mengelola dana perusahaan sekaligus mengoptimalkan strategi operasional yang dijalankan. Dengan demikian, rasio ROE memiliki posisi yang penting sebagai indikator utama dalam menilai keberhasilan perusahaan meningkatkan nilai ekonomi dan daya tarik investasi, terutama pada sektor makanan dan minuman yang memiliki karakteristik padat modal dan berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang.

Terdapat variabel lain yang berpotensi memperkuat maupun memperlemah pengaruh *Good corporate governance* dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan, yaitu pengungkapan lingkungan. Pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang memiliki rantai pasok dengan intensitas penggunaan sumber daya tinggi serta menghasilkan limbah organik dalam jumlah besar, pengungkapan lingkungan berbasis GRI 300 menjadi aspek penting dalam mendukung

keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Praktik pengungkapan lingkungan yang berkualitas mampu meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat maupun investor (Pereira et al., 2023; Setiawan, 2023), sekaligus memberikan sinyal positif mengenai praktik tata kelola yang bertanggung jawab dan transparan (Aluchna et al., 2023). Dalam posisinya sebagai variabel moderasi, pengungkapan lingkungan berperan dalam memperkuat hubungan antara *Good corporate governance* dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan.

Sejalan dengan penelitian Dani et al. (2023) yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan praktik pengungkapan lingkungan yang baik cenderung memperoleh dampak yang lebih besar dari penerapan GCG terhadap peningkatan nilai perusahaan. Temuan tersebut juga didukung oleh penelitian Samhadi et al. (2024) yang menemukan bahwa pengungkapan lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan ketika diperkuat dengan *good corporate governance* yang efektif, pengaruh tersebut menjadi semakin signifikan. Bahaswar et al. (2025) turut menegaskan bahwa *good corporate governance* dapat memperkuat hubungan antara kinerja lingkungan dan nilai perusahaan, meskipun pengaruh tersebut belum sepenuhnya konsisten untuk pengungkapan lingkungan, sehingga membuka ruang penelitian lebih lanjut pada konteks industri yang berbeda.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengisi gap penelitian terkait peran pengungkapan lingkungan berbasis GRI 300 dalam memperkuat maupun memperlemah pengaruh *Good corporate governance* dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan yang diukur

menggunakan Tobin's Q. Kontribusi tersebut dilakukan melalui pengujian peran moderasi pengungkapan lingkungan secara lebih komprehensif pada perusahaan sektor makanan dan minuman selama periode 2022–2024. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat judul "Pengaruh *Good corporate governance* dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan Dimoderasi Pengungkapan Lingkungan" dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana sinergi antara tata kelola perusahaan, profitabilitas, dan transparansi pelaporan lingkungan mampu memperkuat nilai perusahaan dalam industri strategis tersebut.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pengaruh *Good corporate governance* (GCG) dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan pada berbagai sektor industri di Indonesia. Akan tetapi, hasil yang diperoleh dari penelitian-penelitian tersebut masih menunjukkan temuan yang beragam dan belum konsisten. Beberapa studi mengungkapkan bahwa penerapan GCG berpengaruh positif terhadap peningkatan nilai perusahaan karena tata kelola yang baik mampu menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan sumber daya perusahaan. Namun demikian, terdapat pula penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan GCG tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, terutama pada sektor dengan karakteristik bisnis yang cenderung stabil, seperti industri makanan dan minuman.

Fenomena yang serupa juga terlihat pada penelitian mengenai kinerja keuangan, khususnya penggunaan *Return on Equity* (ROE) sebagai indikator

profitabilitas perusahaan. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa ROE memberikan pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan karena kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan investor serta mendorong kenaikan harga saham. Akan tetapi, beberapa penelitian lainnya menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu ROE tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, terutama pada kondisi ekonomi yang tidak stabil maupun ketika terjadi perubahan perilaku investasi di pasar modal.

Penelitian yang membahas peran pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*) berbasis GRI 300 sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara *Good corporate governance* dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan masih tergolong terbatas. Padahal, dalam era ekonomi yang semakin menekankan aspek keberlanjutan, faktor lingkungan menjadi salah satu elemen penting yang memengaruhi persepsi investor terhadap kinerja serta reputasi perusahaan (Aluchna et al., 2023; Maggi et al., 2023). Perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab lingkungan melalui pengungkapan yang transparan dan komprehensif umumnya dipandang memiliki potensi jangka panjang yang lebih besar dalam menciptakan nilai ekonomi maupun sosial secara berkelanjutan (Pereira et al., 2023; Sari & Sutopo, 2023).

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana interaksi antara *Good corporate governance*, kinerja keuangan, dan pengungkapan lingkungan memengaruhi nilai perusahaan, terutama pada sektor makanan dan minuman yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional serta tingkat ketergantungan yang tinggi

terhadap aspek sosial dan lingkungan. Atas dasar kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara khusus pengaruh GCG dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan pengungkapan lingkungan sebagai variabel moderasi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2024. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan pertanyaan penelitian dapat disusun sebagai berikut:

1. Apakah Kepemilikan Institusional secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2022–2024?
2. Apakah Dewan Komisaris Independen secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2022–2024?
3. Apakah Frekuensi Rapat Dewan Komisaris secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2022–2024?
4. Apakah Kinerja Keuangan secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2022–2024?
5. Apakah Pengungkapan Lingkungan secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2022–2024?
6. Apakah Pengungkapan Lingkungan dapat memoderasi pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan?

7. Apakah Pengungkapan Lingkungan dapat memoderasi pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan?
8. Apakah Pengungkapan Lingkungan dapat memoderasi pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap Nilai Perusahaan?
9. Apakah Pengungkapan Lingkungan dapat memoderasi hubungan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.

5. Menguji dan menganalisis pengaruh Pengungkapan Lingkungan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.
6. Menguji dan menganalisis peran Pengungkapan Lingkungan dalam memoderasi pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.
7. Menguji dan menganalisis peran Pengungkapan Lingkungan dalam memoderasi pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.
8. Menguji dan menganalisis peran Pengungkapan Lingkungan dalam memoderasi pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.
9. Menguji dan menganalisis peran Pengungkapan Lingkungan dalam memoderasi pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, termasuk peneliti selanjutnya, perusahaan, maupun para pemangku kepentingan lainnya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi ke dalam dua

aspek, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bagi peneliti pada masa mendatang, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah sekaligus menjadi bahan acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya pada bidang akuntansi keuangan dan manajemen, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh *Good corporate governance* (GCG) dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan mempertimbangkan pengungkapan lingkungan berbasis GRI 300 sebagai variabel moderasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara itu, manfaat praktis dari penelitian ini dijelaskan berdasarkan pihak yang akan memperoleh manfaat, yaitu sebagai berikut:

- a) Untuk perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan bagi manajemen perusahaan makanan dan minuman mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip *Good corporate governance* dan pengelolaan kinerja keuangan yang baik untuk meningkatkan nilai perusahaan serta daya tarik di mata investor.
- b) Untuk berbagai pemangku kepentingan, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan referensi tambahan bagi investor dalam mengambil keputusan investasi, khususnya dalam menilai perusahaan makanan dan minuman berdasarkan aspek kinerja keuangan (ROE), kualitas penerapan *Good corporate governance* (kepemilikan institusional, komisaris

independen, dan frekuensi rapat dewan komisaris), serta pengungkapan lingkungan berbasis GRI 300 sebagai indikator transparansi dan keberlanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat membantu investor dalam mengevaluasi risiko dan prospek pertumbuhan jangka panjang perusahaan, sehingga keputusan investasi yang diambil menjadi lebih rasional, komprehensif, dan berbasis pada analisis fundamental yang menyeluruh.

